



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
The Supreme Court of the Republic of Indonesia

**PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2022  
Jakarta, 23 Februari 2023**

ADDRESS OF THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME  
COURT AT THE ANNUAL REPORT SPECIAL SESSION  
OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA 2022  
Jakarta, 23<sup>rd</sup> February 2022



**Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh**  
With Unwavering Integrity, Trust Shall Grow







**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**The Supreme Court of the Republic of Indonesia**

**PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2022  
Jakarta, 23 Februari 2023**

**ADDRESS OF THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME  
COURT AT THE ANNUAL REPORT SPECIAL SESSION  
OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA 2022  
Jakarta, 23<sup>rd</sup> February 2022**



**Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.**  
**Ketua Mahkamah Agung RI**  
*Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia*

***Bismillahirrohmannirrohiim,  
Assalamualaikum warohmatullahi  
wabarokatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.***

- Yang Kami Hormati dan Kami Muliakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo;
- Yang Kami Hormati dan Kami Muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak K.H. Ma'ruf Amin;
- Yang Kami Hormati Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
- Yang Mulia Para Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat;
- Yang Kami Hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, dan Kapolri;
- Yang Kami Muliakan Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, beserta Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dan Mitra Pembaruan Mahkamah Agung;
- Yang Kami Muliakan Para Purnabakti Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama di seluruh Indonesia;
- Yang Kami Hormati Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia;

***Bismillahirrohmannirrohiim,  
Assalamualaikum warohmatullahi  
wabarokatuh,  
Good tidings to all of us,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.***

- His Excellency, President of the Republic of Indonesia Ir. Joko Widodo;
- Esteemed Leadership of High State Institutions;
- The Honorable Chief Justices of the Supreme Court of Friendly Nations;
- Esteemed Cabinet Ministries of Indonesia Maju, Chief of the Indonesian Armed Forces, Attorney General, and Chief of the National Police;
- His Excellencies the Ambassadors of Friendly Nations and Representatives of International Organizations and Development Partners of the Supreme Court;
- Distinguished Former Leaders of the Supreme Court, Justices, Appellate Court Judges, and First Instance Court Judges throughout Indonesia;
- Esteemed Rectors and Heads of Higher Education Institutions throughout Indonesia;

- Yang Kami Hormati, Ketua Umum Darmmayukti Karini dan Ketua Dharmmayukti Karini Mahkamah Agung beserta jajarannya;
- Yang Kami Hormati, Para Pimpinan Redaksi, Jurnalis dan Wartawan dari Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online;
- Warga Peradilan di seluruh Indonesia yang menyaksikan secara virtual, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga ke Pulo Rote, serta hadirin sekalian yang saya banggakan.
- Esteemed Chairperson of Darmmayukti Karini Chairperson of Dharmmayukti Karini of the Supreme Court and Staff;
- Esteemed Editors in Chief and Journalists of Printed, Electronic and Online Media;
- Members of the Judicial Community in all of Indonesia attending this event virtually, from Sabang to Merauke, from Miangas to Pulo Rote, distinguished ladies and gentlemen.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka Sidang Istimewa, dengan agenda tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022, yang diselenggarakan secara hybrid dari Ruang Prof. Kusumah Atmaja lantai 14 Gedung Tower Mahkamah Agung dan diikuti oleh warga peradilan pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Saya atas nama Pimpinan Mahkamah Agung, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta seluruh undangan, baik yang hadir secara langsung, maupun yang hadir secara daring, karena kehadiran Bapak dan Ibu semua, merupakan kebanggaan bagi kami dan segenap insan peradilan di seluruh Indonesia.

Praises and gratitude we offer to God the Almighty, for it is because of his grace and with His blessing that we can gather here today to attend this Special Session with the sole agenda of presentation of the 2022 Annual Report of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, organized in a hybrid manner from the Prof. Kusumah Atmaja Hall, 14<sup>th</sup> floor of Mahkamah Agung Tower and watched by members of the four main branches of the Indonesian judiciary.

Speaking on behalf of the of the leadership of the Supreme Court, I express my profound gratitude and highest appreciation for the presence of the President of the Republic of Indonesia, the Vice President of the Republic of Indonesia, and all distinguished invitees who are attending this event by online as well as offline means, as your being with us today is a source of pride for me and all of the judiciaries in Indonesia.

**Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022 ini, mengusung tema: **“INTEGRITAS TANGGUH, KEPERCAYAAN PUBLIK TUMBUH.”** Tema tersebut mengisyaratkan sebuah tekad dan kesungguhan Mahkamah Agung untuk membangun kembali kepercayaan publik, melalui penguatan aspek integritas, karena integritas merupakan fondasi bagi tegaknya kemandirian lembaga peradilan. Integritas ibarat sebuah akar yang menancap kuat ke dalam tanah, menyangga, dan menopang berdirinya batang, ranting, dan daun, sehingga kokohnya integritas akan membentuk fundamen, dalam sebuah lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sebagai indikator dari Perwujudan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan cobaan. Setelah hampir tiga tahun kita berjuang melawan pandemi Covid-19, Mahkamah Agung kembali diterpa musibah besar, 2 orang Hakim Agung dan beberapa aparatur Mahkamah Agung diduga melakukan tindak pidana korupsi, yang menimbulkan guncangan hebat bagi kepercayaan publik, serta merusak citra, dan nama baik lembaga peradilan.

Oleh karena itu, saya atas nama Pimpinan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya,

**Distinguished ladies and gentlemen,**

The 2022 Annual Report of the Supreme Court adopts the theme of **“WITH UNASSAILABLE RESILIENCE, PUBLIC TRUST WILL GROW.”** The theme implies the resolution and determination of the Supreme Court to rebuild the public’s trust through the strengthening of integrity, as integrity is the foundation of judicial independence. Integrity is akin to claws dug deep into the ground, supporting and holding up the trunk, branches and leaves, thus unwavering integrity serves as a foundation for a clean and dignified judiciary as an indicator of the manifestation of a Grand Judiciary of the Republic of Indonesia.

Two thousand and two was year filled with trials and tribulations. After almost three years having to struggle against the pandemic, the Supreme Court was again hit by a major tragedy. Two justices and several Supreme Court staff members were alleged to have committed corruption which caused upheaval on the public’s trust, as well as damaging the image and reputation of the judiciaries.

As such, I, on behalf of the Leadership of the Supreme Court and the subordinate courts, extend my profound apology to the

menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, atas terjadinya peristiwa tersebut. Kami bertekad untuk menjadikan momentum ini, sebagai titik balik dalam melakukan reformasi total, dengan melakukan pembersihan dari oknum-oknum aparatur, dan penataan kembali sistem pengawasan dan pembinaan, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberhentikan sementara Hakim Agung dan Aparatur Mahkamah Agung yang diduga terlibat tindak pidana, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Melakukan rotasi dan mutasi aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara, untuk memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan jual beli perkara;
3. Menerbitkan SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Tenaga Teknis di Mahkamah Agung, menggunakan rekam jejak integritas dengan melibatkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, KY, KPK, dan PPATK, analisis LHKPN dan eksaminasi putusan bagi Hakim Tingkat pertama dan Hakim Tingkat Banding yang menjadi tenaga teknis di Mahkamah Agung;

Indonesian people for these incidents. We are determined to use this momentum as a turning point to undergo a total reform by purging the organization of insubordinate personnel and reorganize the supervisory and development system by taking following steps:

1. suspend the justices and Supreme Court employees who are believed to have been involved in the crime until the passing of judgment with permanent legal force;
2. invoke rotation and transfer procedures within the Supreme Court, particularly among personnel involved in case management to sever the route that is believed have been used by the unscrupulous individuals to commit case rigging;
3. issue Chief Justice Decree Number 349/KMA/SK/XII/2022 regarding Guidelines for the Filling of Positions and Selection of Technical Personnel at the Supreme Court by utilizing information on integrity track record involving the Supreme Court Supervisory Board, Judicial Commission, the Corruption Eradication Commission, the Central Financial Transaction Reporting and Analysis, Asset Declaration analysis, and review of decisions for first



4. Melakukan pemeriksaan terhadap atasan langsung aparatur yang terlibat dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk memantau dan mengawasi aparatur Mahkamah Agung di bawah koordinasi langsung Ketua Kamar Pengawasan;
6. Membangun kerjasama dengan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu;
7. Menurunkan *mysterious shopper* untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di Kantor Mahkamah Agung, yang terkoordinasi dengan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
8. Membentuk kanal pengaduan khusus (*Bawas Care*) melalui saluran whatsapp yang terhubung langsung dengan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, sebagai sarana untuk menyampaikan laporan dan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung dengan nomor pengaduan 0821-2424-9090.
9. Membangun keturutsertaan masyarakat untuk terlibat menjadi instance and appellate judges who serve as technical staff at the Supreme Court;
4. conduct investigation on the direct supervisors of the employees allegedly involved in the code of ethics violation and criminal offenses in accordance with Supreme Court Regulation Number 8 of 2016 concerning Supervision and Development of Immediate Supervisors within the Supreme Court and Subordinate Courts;
5. establish a Special Task Force (Satgasus) operating under the purview of the Supreme Court Supervisory Body to monitor and oversee Supreme Court employees under the direct coordination of the Chairperson of the Oversight Chamber;
6. develop cooperation with the Judicial Commission to carry out supervision and education in an integrated manner;
7. assign *mysterious shoppers* to carry out monitoring and supervisory activities at the Supreme Court Office in coordination with the Chairperson of the Supreme Court Supervisor Chamber;
8. establish a special complaint channel (*Bawas Care*) through a WhatsApp account connected directly to the Chairperson of the Supreme Court Supervisory Chamber as a means to submit reports and complaints of

- mysterious shopper* yang tindak lanjutnya dilakukan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;
10. Menyusun regulasi persidangan pembacaan amar putusan secara virtual bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali;
  11. Membangun aplikasi penunjukan majelis hakim dengan menggunakan teknologi robotik, berdasarkan kualifikasi perkara dan beban kerja dari para Hakim Agung;
  12. Melakukan revisi sistem presensi kehadiran bagi para hakim dan aparatur di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan menggunakan sistem GPS terkunci, yang langsung terhubung kepada atasan langsung di satuan kerja masing-masing;
  13. Merancang pembangunan PTSP Mandiri, bagi layanan informasi di Mahkamah Agung;
  14. Mengeluarkan instruksi yang berisi pelaksanaan pakta integritas bagi hakim dan aparatur peradilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang dibacakan dan didengar di setiap ruangan Mahkamah Agung dan satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia minimal 2 kali seminggu.
- alleged violations that occur at the Supreme Court, at the number 0821-2424-9090;
9. encourage public participation to be involved as mysterious shoppers, the output of which would be followed up jointly by the Supreme Court and the Judicial Commission;
  10. draft regulations allowing for virtual cassation and case decision announcement sessions;
  11. develop an application for the formation of panel of judges using an automated system based on case criteria and the workload of the justices;
  12. revise the attendance recording system for justices and employees of the Supreme Court and the subordinate courts by using a locked GPS system directly connected to the immediate supervisor in their respective work units;
  13. design the development of the self-administered one-stop information service at the Supreme Court;
  14. issue the instruction emphasizing the implementation of the integrity pact for the justices, judges, and judicial apparatus, which is broadcasted in every room of the Supreme Court and courts throughout Indonesia at least two times a week.

14 langkah tersebut, selain bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur dalam

Aside from being intended to regain the trust of the public, such steps are also expected to boost the performance of personnel of their duties and functions to

menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai bentuk keberlanjutan reformasi peradilan, dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Selain memfokuskan pada aspek integritas aparatur, Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi dan penyempurnaan sistem peradilan elektronik, bagi semua jenis perkara dan semua tingkat pemeriksaan, berdasarkan tiga regulasi yang diterbitkan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Tidak cukup sampai di situ, Mahkamah Agung juga telah memelopori pengintegrasian sistem peradilan elektronik bagi semua institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK,

sustain justice reform in order to establish a grand and dignified judiciary.

In addition to focusing on the integrity of its personnel, the Supreme Court also continues to optimize and enhance the electronic court system for all case types and every level of hearing based upon three regulations that were issued in 2022, as follows:

1. Supreme Court Regulation Number 6 of 2022 on Electronic Administration of Filing and Trial of Cassation and Case Review at the Supreme Court.
2. Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 on Amendment to Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2019 on Electronic Administration of Filing and Trial of Cassation and Case Review at the Supreme Court.
3. Supreme Court Regulation Number 8 of 2022 on Amendment to Regulation of the Supreme Court Number 4 on Electronic Administration of Filing and Trial of Cassation and Case Review at the Supreme Court.

Not intending to cease its efforts at that stage, the Supreme Court also initiated the integration of electronic judicial system for all law enforcement institutions, namely the National Police, Prosecutor's

Pengadilan dan Rutan, melalui aplikasi elektronik berkas pidana terpadu atau disingkat e-BERPADU.

Aplikasi e-BERPADU adalah aplikasi yang memberikan layanan bagi proses administrasi perkara pidana pada tahapan pra persidangan, yang mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi atau SPPT-TI yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPPENAS. Dengan adanya interkoneksi di antara institusi penegak hukum, maka pertukaran data dan pelimpahan berkas perkara, bisa dilakukan secara elektronik, sehingga proses penanganan perkara pada setiap tahapan pemeriksaan bisa lebih cepat, efektif, dan efisien.

### **Hadirin sekalian yang saya hormati.**

Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran penanganan perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sebagai berikut.

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar **46,33%** dibandingkan perkara yang masuk di tahun 2021. Dengan meningkatnya jumlah perkara

Office, Election Eradication Commission, the courts and correctional facilities through the integrated electronic case files application, or e-BERPADU for short. e-BERPADU is an application that provides services relating to the criminal case administration process at the pre-trial stage supporting the Information Technology-Based Integrated Criminal Justice System or SPPT-TI developed by the Coordinating Ministry for Politics, Law and Security together with the National Development Planning Agency or BAPPENAS. With the interconnection between law enforcement institutions, data exchange and case files can be exchanged electronically to allow case handling process at each stage of examination can be done faster, more effective and more efficient.

### **Distinguished ladies and gentlemen,**

I will further present to you an overview of the case handling process that is currently applied at the Supreme Court and subordinate courts, as follows.

The number of cases received by the Supreme Court throughout 2022 experienced a significant increase, namely by 46.33% compared to cases submitted in 2021. With the increase of incoming cases, the burden of resolving them has

yang masuk di tahun 2022 maka beban penyelesaian perkara otomatis juga menjadi meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jumlah Hakim Agung yang ada saat ini hanya 45 orang dari jumlah seharusnya menurut undang-undang, yaitu 60 orang.

Beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2022 adalah sebanyak **28.284** perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak **28.109** perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2021 sebanyak **175** perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara di tahun 2022 sebanyak **28.024** perkara. Jumlah perkara yang diputus tersebut meningkat **45,71%** dari jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021, **sekaligus menjadi jumlah dan prosentase memutus tertinggi sepanjang berdirinya Mahkamah Agung.**

Selanjutnya, mengenai jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung telah berhasil mengirim salinan putusan sebanyak **31.455** perkara atau meningkat sebesar **45,72%** dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah minutasi dan pengiriman putusan ke pengadilan pengaju pada tahun 2022 merupakan **capaian prestasi tertinggi, sekaligus rekor yang pernah dicapai Mahkamah Agung sepanjang masa.**

drastically increase accordingly when compared to the previous year, while the current number of justices is only 45 persons, which is less than the number mentioned in the Law of the Supreme Court, namely 60 persons.

Caseload at the Supreme Court in 2022 is **28,284** cases, consisting of **28,109** incoming cases, in addition to the remaining 175 cases carried over from 2021. Of the total caseload, 28,024 cases have been decided by the Supreme Court in 2022. The number of cases decided increased by 45.71% compared to the figure for 2021, **as well as being the highest number and percentage decided throughout the establishment of the Supreme Court.**

Further, as regards case files that have been finalized and sent back to the submitting court, throughout 2022 the Supreme Court has managed to send 31,455 copies of judgments, an increase by 45.72% compared to the previous year. Data shows that the number of finalized case files judgments returned to the submitting court in 2022 **constitute the highest ever and a new record for the Supreme Court.**

Sedangkan jumlah perkara yang diputus Mahkamah Agung dengan waktu penyelesaian di bawah 3 bulan adalah sebanyak **27.817** perkara, atau sebesar **99,26%** dari total perkara yang diputus selama tahun 2022. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dari capaian kinerja di tahun 2021, yaitu sebesar **97,77%**.

Data-data di atas menunjukkan bahwa kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan dan **sebagian besar merupakan capaian kinerja tertinggi Mahkamah Agung dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.** Untuk gambaran kinerja Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Beban perkara pada tahun 2022 sebanyak **55.319** perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak **49.674** perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2021 sebanyak **16.645** perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebanyak **40.784** perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar **73,81%**. Sedangkan gambaran kinerja penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the number of cases adjudged by the Supreme Court with a resolution period under three months was **27,817** cases, or **99.16%** of the total cases decided throughout 2022. The figure is also higher than the level achieved in 2021, which was at **97.77%**.

The data above points to the fact that the case handling performance of the Supreme Court in 2022 has exceeded the set target and most were also the **Supreme Court's highest achievement compared to the previous years.**

To give a snapshot of the performance of the Appellate Courts within the four court types and the tax court, I present to you the following data.

Caseload in 2022 was **55,319** cases, consisting of **49,674** incoming cases, in addition to the remaining cases from 2021, totaling **16,645**. Of these, **40,784** cases have been decided by the Courts of Appeal and the Tax Court. Thus, productivity ratio of case resolution at the Court of Appeal and Tax Court is **73.81%**. Meanwhile, description of the performance of case handling at the Courts of First Instance of the four judicial type is as follows:

Beban perkara tahun 2022 sebanyak **3.559.665** perkara, terdiri dari perkara masuk sebanyak **3.498.355** perkara, ditambah sisa perkara tahun 2021 sebanyak **61.310** perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak **3.444.803** perkara, dan perkara yang dicabut sebanyak **55.151** perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2022 adalah sebanyak **59.711** perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan adalah sebesar **98,32%**.

Selain gambaran penanganan perkara secara umum, saya juga akan menguraikan tentang kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (*e-Court*) sebagai berikut:

Pada tahun 2022, jumlah Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, dan Perkara Tata Usaha Negara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak **283.183** perkara, atau meningkat sebesar **25,82%** dibandingkan tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak **26.686** perkara telah berhasil disidangkan secara *e-Litigation*.

Sementara itu, pada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi *e-Court* pada tahun 2022 adalah

Caseload in 2022 was **3,559,665** cases, consisting of **3,498,355** incoming cases, in addition to the remaining **61,310** cases from 2021. Of this figure, **3,444,803** cases were decided by the Courts of First Instance, and **55,151** cases were withdrawn, making the remaining cases in 2022 at **59,711** cases. As such, productivity ratio in the resolution of cases at the Courts of First Instance of the four judicial type is **98.32%**.

In addition to the overview of case handling, I will also be describing the our performance with respect to case handling through electronic means (*e-Court*).

In 2022 the number civil cases, civil religious cases, and state administrative cases filed through the *e-Court* application at the Courts of First Instance was **283,183** cases, representing an increase by **25.82%** when compared to the figure in 2021. Of that number, **26,686** cases has been adjudicated through *e-Litigasi*.

Meanwhile, among the appellate courts, cases that have been filed for appeal using the *e-Court* application in 2022 was **3.562** cases. As such, the total number of cases

sebanyak **3.562** perkara. Dari jumlah perkara yang terdaftar ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu, yaitu sebanyak **4.017** perkara semuanya telah selesai diputus secara e-Ligitasi.

Jumlah Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya yang menggunakan layanan *e-Court* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebanyak **281.492** pengguna, yang terdiri dari **52.135** Pengguna Terdaftar dari kalangan advokat dan **229.357** Pengguna Lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.

Bagi perkara pidana (di luar perkara pelanggaran lalu lintas/tilang), perkara pidana militer, dan perkara jinayat yang disidangkan secara elektronik sejak berlakunya Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, tercatat sebanyak **118.313** perkara, telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik. Jumlah ini berkurang **29,78%** jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai **168.480** perkara. Penurunan jumlah persidangan elektronik dalam perkara pidana berkorelasi dengan semakin membaiknya situasi pandemi yang menjadi salah satu alasan penyelenggaraan persidangan secara elektronik.

registered as well as cases carried over from the previous year was **4,017** cases, all of which has ben resolved through *e-Litigasi*.

Number of Registered Users and Other Users that mae use of the *e-Court* service as per 31 December 2022 has reached **281,492** users, consisting of **52,135** Registered Users consisting of legal counsels, and **229,357** Other Users from among individuals, the government, legal institutional users, and incidental proxies.

Of the criminal cases (excluding cases of traffic violations), military criminal cases, and Islamic criminal cases that were tried electronically following the advent of Supreme Court Regulation of 2022 on Amendment to Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 on the Electronic Administration of Criminal Cases, **118,313** cases have been resolved through electronic court session. This number is a decrease by **29.78%** when compared to 2021, which saw **168,480** cases being tried electronically. The lower number of electronic criminal proceedings correlates with the subsiding pandemic, which had been one of the reasons cases were being tried electronically.



Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi bagi perkara perdata dan perkara perdata agama, serta penyelesaian secara diversi bagi perkara tindak pidana anak.

Selama tahun 2022, terdapat **20.861** perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar **92,24%**, sedangkan untuk perkara tindak pidana anak yang berhasil menempuh proses diversi sebanyak **27** perkara, yang mana rasio keberhasilannya meningkat sebesar **90,75%** dari keseluruhan perkara tindak pidana anak yang dilakukan diversi.

Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia, Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*).

Pada tahun 2022, perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan di pengadilan negeri sebanyak **6.461** perkara, sedangkan perkara gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebanyak **164** perkara.

In addition to the achievements elaborated above, the Supreme Court continues to promote the amicable settlement of cases through mediation for civil and civil religious cases, as well as case resolution through diversion for juvenile criminal cases.

Throughout 2022 there has been **20.861** cases that were successfully adjudicated through mediation, which is an increase from 2021 by **92,24%**, while juvenile criminal cases that were resolved through diverse totaled 27 cases, reflecting an increase in the ratio of success by **90.75%** of the total number of such cases that went through diversion.

Meanwhile, to support government programs for ease of doing business in Indonesia, the Supreme Court also continues to optimize policies that are able to accelerate the settlement of cases with small claim values, through the small claims court mechanism.

In 2022, **6,461** simple claims were successfully resolved before the district courts, while **164** of these cases relates to syariah economic disputes were successfully resolved by the Religious Courts/Syar'iyah Courts.

## Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai tingkat kepuasan publik terhadap putusan pengadilan, yang salah satunya diukur dari perbandingan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan dengan jumlah perkara yang diputus oleh tingkat peradilan yang bersangkutan.

Di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), serta perkara perdata permohonan, selama tahun 2022 yang diajukan upaya hukum banding, tercatat sebanyak **18.028** perkara atau sebesar 3,03% dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa, tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar **96,97%**.

Pada tingkat banding, perkara yang diajukan kasasi adalah sebanyak **18.454** perkara atau sebesar **64,94%** dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar **35,06%**.

Sedangkan Pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak **1.881** perkara, atau sebesar

## Distinguished ladies and gentlemen.

Next, I will elaborate on the level of public satisfaction with court decisions, among others measured by comparing the number of appeal petition filed at each level of the judiciary with the number of cases decided by the relevant court at that level.

Outside cases that were tried through expedited proceedings, traffic violation cases as well as petition cases throughout 2022 against which appeal was initiated, **18,028** cases or 3.03% of the total number of cases were adjudged by the first instance courts. This indicates that the satisfaction level of the disputing parties with the decisions of the first instance court was at **96,97%**.

At the appellate level, cases that were filed for cassation totaled **18,454** or **64.94%** of the total cases decided by the appellate courts, indicating that the satisfaction level of the parties concerned with the decisions of the appellate courts was at **35.06%**.

Meanwhile, at the cassation level, the decisions submitted for review totaled **1,881** cases, or **13.75%** of the total

13,75% dari keseluruhan putusan kasasi, sehingga tingkat kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar **86,25%**.

Untuk jumlah pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap, pada perkara pelanggaran lalu lintas, perkara tindak pidana korupsi, perkara narkoba, perkara kehutanan, perkara perlindungan anak, perkara perikanan, perkara pencucian uang, dan perkara-perkara tindak pidana lainnya saya akan uraikan sebagai berikut.

Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar **Rp18.012.449.201.448,90 (delapan belas triliun, dua belas miliar, empat ratus empat puluh sembilan juta, dua ratus satu ribu, empat ratus empat puluh delapan rupiah, sembilan puluh sen)**. Sedangkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum adalah sebesar **Rp76.624.037.590.359 (tujuh puluh enam triliun, enam ratus dua puluh empat miliar, tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu, tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)** dan peradilan militer sebesar **Rp34.355.505.535 (tiga puluh empat miliar, tiga ratus lima puluh lima juta, lima ratus lima ribu, lima ratus tiga puluh lima rupiah)**.

cassation decisions, thus placing the level of satisfaction with the cassation decision at **86.25%**.

With regard to fines and restitutions imposed by virtue of judgments that have acquired permanent legal force relating to traffic violations, corruption cases, narcotics cases, forestry cases, child protection cases, fishing cases, money laundering cases, and other criminal cases, I can elaborate as follows.

Fines and restitutions that were ordered to be paid based upon decisions of the Supreme Court totaled IDR 18,012,449,201,448.90 (eighteen trillion twelve billion four hundred forty-nine million two hundred one thousand four hundred forty-eight and ninety cents rupiah). Meanwhile, the amount of fines and restitutions ordered to be paid under decisions of first instance general courts that have acquired permanent legal force is IDR 76,624,037,590,359 (seventy six trillion six hundred twenty four billion thirty-seven million five hundred ninety thousand three hundred and fifty-nine rupiahs), and IDR 34,355,505,535 (thirty four billion three hundred fifty-five million five hundred five thousand five hundred and thirty-five rupiah) by the military courts.

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah memberikan kontribusi bagi penerimaan keuangan negara yang berasal dari penarikan PNPB tahun 2022 senilai **Rp79.833.985.893** (tujuh puluh sembilan miliar, delapan ratus tiga puluh tiga juta, sembilan ratus delapan puluh lima ribu, delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar **4,70%** dari pendapatan yang diperoleh tahun 2021, yaitu senilai **Rp76.252.122.669** (tujuh puluh enam miliar, dua ratus lima puluh dua juta, seratus dua puluh dua ribu, enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

#### **Hadirin sekalian yang saya hormati.**

Setelah saya menyampaikan gambaran umum tentang capaian kinerja di bidang teknis perkara, sekarang saya akan menguraikan gambaran umum tentang capaian kinerja di bidang kesekretariatan sebagai berikut.

#### **Pertama, Bidang Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara.**

Total pagu awal anggaran Mahkamah Agung tahun 2022 adalah sebesar **Rp12.517.702.058.000** (dua belas triliun, lima ratus tujuh belas miliar, tujuh ratus dua juta, lima puluh delapan ribu rupiah). setelah mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar **Rp983.839.540.000** (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar, delapan ratus tiga puluh sembilan

In addition, the Supreme Court has also contributed to non-tax state revenue from the charging of fees throughout 2022 in the amount of **IDR 79,833,985,893** (seventy-nine billion eight hundred thirty-three million nine hundred eighty-five thousand eight hundred and ninety-three rupiah). This is an increase by 4.70% from income earned in 2021, which was **IDR 76,252,122,669** (seventy-six billion two hundred fifty-two million one hundred twenty-two thousand six hundred sixty-nine rupiah).

#### **Distinguished ladies and gentlemen,**

Having presented an overview of performance in the technical aspect of case handling, I will now give an overview of performance in secretarial matters.

#### **Firstly, Utilization of Budget Performance in State Finance Management.**

Initially, the Supreme Court's total budget ceiling for 2022 was **IDR 12,517,702,058,000** (twelve trillion five hundred seventeen billion seven hundred two million fifty-eight thousand rupiah). Following a budget adjustment (*refocusing*) by **IDR 983,839,540,000** (nine hundred eighty-three billion eight hundred thirty-nine million five hundred

**juta, lima ratus empat puluh ribu rupiah)** mendapatkan hibah sebesar **Rp4.333.497.000 (empat miliar, tiga ratus tiga puluh tiga juta, empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** dan penggunaan dana PNBP sebesar **Rp15.059.036.000 (lima belas miliar, lima puluh sembilan juta, tiga puluh enam ribu rupiah)** maka total pagu Mahkamah Agung tahun 2022 menjadi **Rp11.514.469.985.000 (sebelas triliun, lima ratus empat belas miliar, empat ratus enam puluh sembilan juta, sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp11.278.876.171.102 (sebelas triliun, dua ratus tujuh puluh delapan miliar, delapan ratus tujuh puluh enam juta, seratus tujuh puluh satu ribu, seratus dua rupiah)** atau **97,95%**.

Di bidang pengelolaan keuangan negara, Mahkamah Agung kembali berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang **ke-10** kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut juga diikuti oleh keberhasilan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan 100% tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk yang kedua kalinya, yaitu tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam menjalankan prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.

forty thousand rupiah), acquisition of a grant of IDR 4,333,497,000 (four billion three hundred thirty-three million four hundred and ninety-seven thousand rupiahs) and use of non-tax state revenue (PNBP) funds of IDR 15,059,036,000 (fifteen billion fifty-nine million thirty-six thousand rupiahs), total ceiling of the Supreme Court's budget in 2022 became IDR 11,514,469,985,000 (eleven trillion five hundred fourteen billion four hundred sixty-nine million nine hundred and eighty- five thousand rupiah). Of the total budget ceiling, the spending of the Supreme Court budget in 2022 was IDR 11, 278,876,171,102 (eleven trillion two hundred seventy eight billion eight hundred seventy six million one hundred seventy one thousand one hundred two rupiah) or 97.95%.

With respect to state financial management, the Supreme Court again managed to attain an unqualified opinion for the 10<sup>th</sup> consecutive time. This achievement was followed by the successful completion 100% of the corrective actions recommended by in the BPK audit results for the second time, namely in 2021 and 2022. This is testament to the seriousness of the Supreme Court in implementing transparent and accountable accounting principles in managing state finances.

Selain itu, Mahkamah Agung juga meraih juara pertama, dalam kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan, untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dari Kementerian Keuangan, di bidang pengelolaan aset dan lelang. Penghargaan tersebut diterima Mahkamah Agung dalam acara Anugerah Reksa Bandha Tahun 2022.

Semua capaian yang saya uraikan di atas tidak terlepas dari peran sistem teknologi yang terus dikembangkan oleh jajaran Sekretariat Mahkamah Agung, dengan dibangunnya berbagai aplikasi yang dapat membantu kinerja aparatur, yaitu Aplikasi e-BIMA atau *elektronik Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability*, di bidang penatakelolaan keuangan negara, aplikasi e-SADEWA atau *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*, di bidang penatakelolaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan aplikasi e-PRIMA atau *electronic Procurement Implementation Management and Accountability*, di bidang pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Additionally, the Supreme Court also placed first in the category of Improving Sustainable Governance for Ministries/ Institutions as determined by the Ministry of Finance in the area of asset management and auctions. The award was received by the Supreme Court at the 2022 Reksa Bandha Award ceremony.

All the achievements that I have described above are due in no small part to the role of technology systems that are continually being developed by the Secretariat of the Supreme Court through the creation of various applications designed to support personnel in performing their tasks, namely the Electronic Budget Implementation, Monitoring and Accountability or *e-Bima* application in the area of state financial management; the Electronic State Asset Development and Enhancement Work or *e-SADEWA* application in the area of management of state assets (BMN) at the Supreme Court and subordinate courts; and the Electronic Procurement Implementation Management and Accountability or the *e-PRIMA* application in the area goods/services procurement management within the Supreme Court and subordinate courts.

## **Kedua, Bidang Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.**

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat, untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan. Dalam hal pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten terus melakukan upaya perubahan dan perbaikan budaya kerja dan pelayanan publik.

Pada tahun 2022 satuan kerja yang memperoleh predikat WBK sebanyak 5 satuan kerja, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Medan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Pengadilan Agama Unaha, Pengadilan Agama Mimika dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sedangkan yang meraih predikat WBBM adalah satu satuan kerja, yaitu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dengan perolehan tersebut, maka sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah keseluruhan satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK, sebanyak 203 satuan kerja, dan yang telah memperoleh predikat WBBM sebanyak 15 satuan kerja. Melengkapi keberhasilan tersebut Pengadilan Militer 1-06

## **Secondly, Bureaucratic Reform and Integrity Zone Towards Corruption Free Area (WBK) and Clean and Service Oriented Bureaucracy Area.**

The Supreme Court and the subordinate courts have exhibited a strong commitment to transparency and accountability in organizational governance through a justice reform program. In terms of developing integrity zones towards Corruption Free Area (WBK) and Clean and Service Oriented Bureaucracy Area (WBBM), the Supreme Court and the subordinate courts consistently make efforts to change and improve work culture and public services.

In 2022 there were five work units that received WBK status, namely the Medan Religious High Court, the Kendari Religious High Court, the Unaha Religious Court, the Mimika Religious Court and the Directorate General of the Military and State Administrative Courts, while WBBM status was given to one work unit, namely Yogyakarta Military Court II-11.

With these attainments, in the period from 2018 to 2022 the total number of work units that have received WBK status has been 203 work units, while WBBM status has been declared upon 15 work units. Complementing this success, Military Court 1-06 of Banjarmasin placed first among units providing public service in

Banjarmasin berhasil meraih peringkat 1 unit penyelenggaraan pelayanan publik dalam kategori “Pelayanan Prima” untuk lingkup Kementerian/Lembaga Khusus pada tahun 2022.

### **Ketiga, Bidang Keterbukaan Informasi Publik.**

Mahkamah Agung sejak tahun 2007 telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam layanan informasi publik atau setahun sebelum terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengeluarkan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. SK-KMA tersebut kemudian diperbarui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pada tahun 2022 Mahkamah Agung kembali melakukan revisi dan penyempurnaan dengan menerbitkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dengan berlakunya standar pelayanan informasi berdasarkan regulasi tersebut, Mahkamah Agung memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Publik sebagai lembaga yang informatif tahun 2022, dengan mendapatkan nilai **97,13**. Sedangkan di bidang inovasi dan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung juga meraih

the “Excellent Service” given to Ministries/ Specialized Agencies in 2022.

### **Thirdly, Disclosure of Public Information.**

Since 2007 the Supreme Court has implemented the principles of transparency and accountability in providing public information services, or one year prior to the enactment of Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, by issuing Chief Justice Decree Number 144/KMA/SK/VHL/2007 on Information Disclosure in the Judiciary. The Decree was subsequently updated with Chief Justice Decree Number 1-144/KMA/SK/I/2011 on Guidelines for Information Services in Courts. In 2022 the Supreme Court again revised and perfected it by issuing SK KMA Number 2-144/KMA/SK/VIII/2022 concerning Standards for Public Information Services in the Judiciary.

With the adoption of information service standards based on these regulations, in 2022 the Supreme Court received a public information disclosure award from the Public Information Commission for being an informative institution with a score of **97.13**. Meanwhile, in the area of innovation and utilization of technology, the Supreme Court also won the Merdeka



penghargaan Merdeka Award tahun 2022 untuk kategori Program Inovatif untuk Negeri atas inovasi perubahan di bidang pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

#### **Keempat, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia.**

Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil telah melakukan reformasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur dengan menerapkan konsep *corporate university* dalam rangka memenuhi standardisasi potensi dan talenta yang dimiliki oleh para aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Hal tersebut sebagai bentuk upaya Mahkamah Agung dalam mempersiapkan SDM yang unggul dan berkualitas di tengah pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

Sedangkan di bidang pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan, selama tahun 2022 Balitbang Diklat Kumdil telah berhasil mendidik dan melatih sebanyak **18.900** aparatur, yang terbagi ke dalam dua bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan teknis sebanyak **11.226** aparatur, atau sebesar **411,21%** dari target yang direncanakan, yaitu sebanyak **2.730** aparatur serta pelatihan manajemen kepemimpinan sebanyak **7.674** aparatur, atau sebesar **101,66%** dari target yang direncanakan, yaitu **7.549** aparatur.

Award in 2022 in the Innovative Program for the Country category for innovative changes that it introduced in area of information technology-based public services.

#### **Fourthly, Human Resources Management**

The Supreme Court through the Legal and Judicial Research and Training Unit (Litbang Diklat Kumdil) has reformed its education and training institutions by applying the concept of corporate university in order to conform with the standardization of potentials and talent of personnel of the Supreme Court and subordinate courts. This is part of the Supreme Court's efforts to prepare superior and quality human resources amidst the rapidly changing times and advances in technology.

Meanwhile, with regard to personnel competence development through training, throughout 2022 the training unit has managed to train as many as **18,900** personnel under two types of competency training, namely technical for **11,226** personnel, or **411.21%** of the targeted **2,730** personnel, as well as leadership management training for **7,674** personnel, or **101.66%** of the planned target of **7,549** personnel.

Atas capaian di bidang pengelolaan sumber daya manusia tersebut, pada tahun 2022 Mahkamah Agung berhasil meraih penghargaan **BKN Award untuk non kementerian tipe besar dari Badan Kepegawaian Negara.**

### **Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Aspek integritas menjadi kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga Mahkamah Agung akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan di tubuh lembaga dengan penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan, agar ke depannya tingkat pelanggaran disiplin bisa terus berkurang dan kepercayaan publik akan tumbuh seiring dengan kokohnya integritas dari segenap aparturnya.

Selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan kinerja pengawasan dan penegakan disiplin aparatur pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut:

Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menunjuk 16 satuan kerja pengadilan untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang disingkat SMAP. Penunjukan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yang telah menetapkan 7 satuan kerja pengadilan sebagai *pilot*

For these achievements relating to human resources management, in 2022 the Supreme Court won the **BKN Award for large non-ministerial agencies from the State Civil Service Agency.**

### **Ladies and gentlemen,**

The aspect of integrity is key in the effort to build a clean and dignified judicial institution, and thus the Supreme Court will continue to undertake restructuring and improvements within itself by strengthening the supervisory and development functions to ensure that moving forward the rate of disciplinary transgressions can continue to be reduced and public trust will grow along with the unwavering integrity of all personnel.

I will further present to you achievements as regards supervision and enforcement of discipline among all personnel of the Supreme Court and the subordinate courts.

The Supreme Court through its Supervisory Body has designated 16 court work units for the implementation of the Anti-Bribery Management System, or SMAP for short. The designation was in continuation of the previous year's designation of seven court work units under a pilot project for the implementation of the program. This

*project* pelaksanaan program SMAP. Hal ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Jumlah pengaduan yang diterima Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2022 sebanyak 3.988. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.212 pengaduan telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 776 pengaduan masih dalam proses tindak lanjut penanganan.

Jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2022 adalah sebanyak 271 sanksi disiplin yang terdiri dari sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan, dengan rincian sebagai berikut:

- Hakim dan Hakim Ad Hoc sebanyak 146 sanksi yang terdiri dari 22 sanksi berat, 22 sanksi sedang dan 102 sanksi ringan.
- Pejabat teknis yang terdiri dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti sebanyak 85 sanksi yang terdiri dari 15 sanksi berat, 19 sanksi sedang dan 51 sanksi ringan
- Pejabat struktural dan pejabat kesekretariatan sebanyak 19 sanksi yang terdiri dari 5 sanksi berat, 6 sanksi sedang dan 8 sanksi ringan.

is a manifestation of the of commitment by the Supreme Court and subordinate courts to pursue bureaucratic reform to create a clean and dignified judiciary.

The number of complaints received by the Supreme Court Oversight Body in 2022 was **3,988**. Of these, **3,212** complaints have been processed, while the remaining **776** complaints are still in the process of being investigated.

The total number and types of disciplinary sanctions placed on judges and judicial staff in 2022 are 271 disciplinary sanctions consisting of severe sanctions, moderate sanctions, and light sanctions, broken down as follows:

- 146 judges and ad hoc judges imposed with 22 severe sanctions, 22 moderate sanctions and 102 minor sanctions;
- technical staff consisting of registrars, junior registrars, deputy registrars, bailiffs and deputy bailiffs imposed with a total of 85 sanctions, consisting of 15 severe sanctions, 19 moderate sanctions and 51 minor sanctions;
- structural officials and secretarial officials imposed with 19 sanctions consisting of five severe sanctions, six moderate sanctions and eight minor sanctions;

- Pejabat fungsional sebanyak 1 sanksi sedang.
- Staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 20 sanksi yang terdiri dari 10 sanksi berat, 4 sanksi sedang dan 6 sanksi ringan.
- functional official imposed with one moderate sanction;
- non-civil servant government staff and employees imposed with 20 sanctions consisting of 10 severe sanctions, four moderate sanctions and six minor sanctions.

### **Hadirin sekalian yang saya hormati.**

Demikianlah secara garis besar hasil capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2022. Kami menyadari, pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, namun Mahkamah Agung selalu optimis dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena saya percaya bahwa untuk mencapai sebuah tujuan yang dicita-citakan tidak seperti melintas di jalan yang lurus tanpa hambatan, melainkan seperti mendaki di sebuah tebing yang terjal, penuh dengan rintangan, namun kita tidak akan pernah berhenti untuk berjalan. Semangat, tekad, dan kerja keras menjadi modal utama untuk menggapai cita-cita dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

### **Distinguished ladies and gentlemen,**

I have presented to you an overview of the Supreme Court's achievements in 2022. We acknowledge that there are certainly many inadequacies that we have to improve upon, but we are always optimistic and continually strives to be better, as I believe that to achieve a goal that one aspires to is not like traversing a straight road without hindrances, but is closer to climbing a steep cliff, full of obstacles. Rest assured, however, that we will not stop moving forward. Enthusiasm, determination, and hard work are the main assets in order to achieve the goal of establishing an Indonesian Supreme Judicial Body.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat, Perwakilan Negara Sahabat, Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pendidikan lainnya, Mitra Perbankan, Taspen, Lembaga-Lembaga yang menjadi mitra Mahkamah Agung, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi-organisasi Advokat, pihak swasta dan semua pihak lainnya, yang telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

Secara khusus, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, Sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, Para Direktur Jenderal dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dan Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung, beserta warga peradilan di seluruh Indonesia atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kita mampu meraih capaian-capaian yang sangat membanggakan ini.

I express my highest gratitude and appreciation to the supreme courts of friendly countries, representatives of friendly countries, state institutions, ministries and non-ministerial government agencies, regional governments, universities and other educational institutions, banking partners, Taspen, institutional partners of the Supreme Court, both domestic and foreign, the media, community organizations, non-governmental organizations, advocate organizations, private parties and all other stakeholders who have contributed in their respective roles.

In particular, I would like to thank all the Chief Justices of the Supreme Courts, the Supreme Court Justices and Ad-Hoc Judges serving at the Supreme Court, the Registrar of the Supreme Court and staff, the Secretary of the Supreme Court and all of their personnel, the Directors General of the four judicial jurisdictions, and Heads of Agencies of the Supreme Court, along with members of the judiciaries throughout Indonesia for their hard work and sincere dedication in carrying out their duties, allowing us to achieve these achievements that we should be proud of.

Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa, semoga Allah SWT/Tuhan YME senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. *Aamiin Ya Robbal'alam, Wabillahittau'fiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Finally, let us pray that God the Almighty will always protect us. *Aamiin Ya Robbal'alam, Wabillahittau'fiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Jakarta, 23 Februari 2023

Jakarta, 23 February 2023

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**





**Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh**  
*With Unwavering Integrity, Trust Shall Grow*



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
*The Supreme Court of the Republic of Indonesia*

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110  
(021) 3843348, 3810350, 3457661  
[persuratan@mahkamahagung.go.id](mailto:persuratan@mahkamahagung.go.id)